

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Maraknya perbincangan mengenai kecurangan dana desa menjadi perhatian khusus di tahun 2017 hingga 2018. Besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat membuka ruang bagi para petinggi desa untuk melakukan penyelewengan dana desa. Sejak tahun 2015 hingga saat ini dana desa yang diberikan oleh pemerintah berjumlah Rp 186 triliun (dilansir dari laman berita online <http://kompas.com> pada 21 November 2018). Namun besarnya dana desa yang diberikan tersebut juga rawan akan praktik korupsi oleh pihak – pihak tertentu. Menurut hasil pemantauan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat bahwa kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2015 hingga tahun 2018 semester I. ICW mencatat ada 17 kasus korupsi dana desa yang terjadi di tahun 2015. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. Sementara tahun 2017, jumlahnya melonjak dua kali lipat menjadi 96 kasus, dan untuk tahun 2018 semester I masih tercatat sebanyak 27 kasus (dikutip dari laman berita online <http://kompas.com> pada 21 November 2018). Dari banyaknya kasus yang tercatat sebagai korupsi dana desa, aktor yang paling sering disebut didalamnya adalah kepala desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam kaitannya dengan dana desa.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dana desa tersebut, para petinggi negara seperti Komisi XI DPR RI dan Presiden Republik Indonesia meminta kepada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk membuat suatu aplikasi yang dapat mengurangi tindak kejahatan dalam hal

pengelolaan keuangan desa. Berbagai kalangan tersebut menilai pentingnya pengawalan terhadap dana desa agar dapat di gunakan secara lebih efisien. Menanggapi hal itu, pada tanggal 15 Juli 2015 untuk pertama kalinya BPKP memperkenalkan sebuah aplikasi yang dibuat untuk mengelola keuangan desa yang dikenal dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal itu sebagai jawaban dari BPKP atas permintaan dari para petinggi negara untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengawal keuangan desa..

Bermula dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPR RI dan KPK pada tanggal 30 Maret 2015 yang meminta BPKP untuk membuat suatu aplikasi yang dapat membantu proses pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2015 Presiden RI juga meminta BPKP untuk merancang sistem pengawasan dana desa yang efektif. Menindaklanjuti permintaan tersebut, BPKP mulai merancang sebuah aplikasi seperti yang diminta. Aplikasi ini dikembangkan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Kemudian pada bulan Juni 2015 untuk pertama kalinya aplikasi ini diimplementasikan di Kabupaten Mamasa. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance (QA)* oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 31 agustus 2016 ketua KPK RI menerbitkan SE B-7508/01-16/08/2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia yang berisi himbauan penggunaan siskeudes untuk mengelola keuangan desa.

Aplikasi siskeudes ini layaknya payung yang mengantisipasi akan penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya siskeudes diharapkan dapat membantu proses pengelolaan keuangan dana desa yang jumlahnya semakin besar, serta untuk membantu mengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Siskeudes ini merupakan hal baru yang diterima oleh desa sebagai aplikasi pengelola keuangan. Tidak mudah bagi para perangkat desa untuk dapat menerima aplikasi ini secara langsung. Untuk itu pemerintah juga telah melakukan pelatihan kepada para perangkat desa yang ditunjuk untuk mengoperasikan aplikasi ini. Siskeudes merupakan aplikasi berbasis sistem yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memudahkan para operator desa melakukan penyusunan laporan keuangannya. Hanya dengan satu kali *input* data, akan muncul beberapa laporan yang dibutuhkan oleh operator. Hal ini karena memang aplikasi siskeudes dirancang secara sederhana dan *user friendly*. *Output* dari aplikasi ini antara lain: Perdes APB Desa, Laporan Realisasi APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per sumber dana, Laporan Konsolidasi di Tingkat Pemda.

Aplikasi siskeudes ini dapat digunakan pada *operating system window* dan dapat juga digunakan pada *windowsXP*, *windows7*, dan *windows8*. Sistem operasi komputer selain *windows* tidak dapat digunakan untuk aplikasi siskeudes. Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah

sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Sejak diuji coba pada tahun 2015 penggunaan aplikasi siskeudes untuk monitoring penyaluran dan pengawasan dana desa dinilai masih banyak kekurangan. Hal ini saya kutip dari laman <http://kompas.com> pada tanggal 5 september 2017 yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP, Iskandar Novianto:

"Padahal kalau satu sistem digunakan di desa, akan lebih mudah juga diintegrasikan dengan sistem yang lain (milik pusat)," kata dia. (<http://kompas.com>).

Selain itu, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Mugowam menyetujui bahwa memang implementasi dana desa masih banyak kekurangan.

"Sudah empat tahun lho ini undang-undang. Tapi belum matic, masih manual terus. Padahal aplikasi (Siskeudes) ini gratis. Tapi enggak ada 50 persen desa yang pakai. Apalagi disuruh bayar," ujar Akhmad. (<http://kompas.com>).

Istilah *'user friendly'* yang dicetuskan oleh BPKP ternyata tidak semudah dimaknai dengan kalimat *'mudah digunakan'* saja. Pasalnya dalam penerapan aplikasi siskeudes tersebut masih banyak ditemukan kekurangan yang terjadi dalam pengaplikasiannya, seperti yang telah disebutkan diatas. Kekurangan yang terjadi bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola aplikasi tersebut dalam hal teknologi, atau dengan kata lain *'gaptek'* (gagap teknologi). Berhubung aplikasi siskeudes adalah terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi, sehingga para penggunanya haruslah paham atau paling tidak memiliki kemampuan dalam hal teknologi. Penelitian dari Irianto (2018) membenarkan akan hal itu. Dalam

penelitiannya menyebutkan bahwa problem dan tantangan pelaksanaan dana desa adalah keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah serta masih sedikit aparatur desa yang 'melek' teknologi sehingga mengakibatkan beberapa aparatur desa harus merangkap pekerjaan. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Larasati (2017) bahwa kendala yang dihadapi desa dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi, dengan melihat pada pelaporan pengelolaan dana desa harus melalui *online*. Namun penelitian dari Puspasari (2018) mengungkapkan hal yang berbeda. Ia menyampaikan bahwa kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa yang memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, cenderung lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa. Gayatri (2018) juga menyampaikan hal yang sama dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes untuk pengelolaan dana desa efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Artinya sumber daya manusia dalam penelitian ini sudah mampu menerapkan aplikasi siskeudes sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berbicara mengenai sumber daya manusia, kisah lain juga mampu ditorehkan oleh Bupati Ponorogo yang mampu menembus prestasi berkat kesuksesannya mengelola keuangan desa. Ia menerima undangan berangkat ke India dari World Bank untuk menularkan ilmu pengelolaan keuangan desa. Orang nomor satu di Pemkab Ponorogo itu diundang ke India setelah mendapatkan penghargaan terbaik dari World Bank dalam penggunaan sistem keuangan desa

(siskeudes) untuk mengelola keuangan desa. Menurutnya, Kabupaten Ponorogo menerapkan aplikasi siskeudes ini pada tahun 2016. Sistem itu diterapkan setelah mendapatkan tawaran program dari BPKP dan World Bank. Dia menerima tawaran itu lantaran program tersebut menarik dan bagus untuk sistem pengelolaan uang desa itu. (<http://kompas.com>).

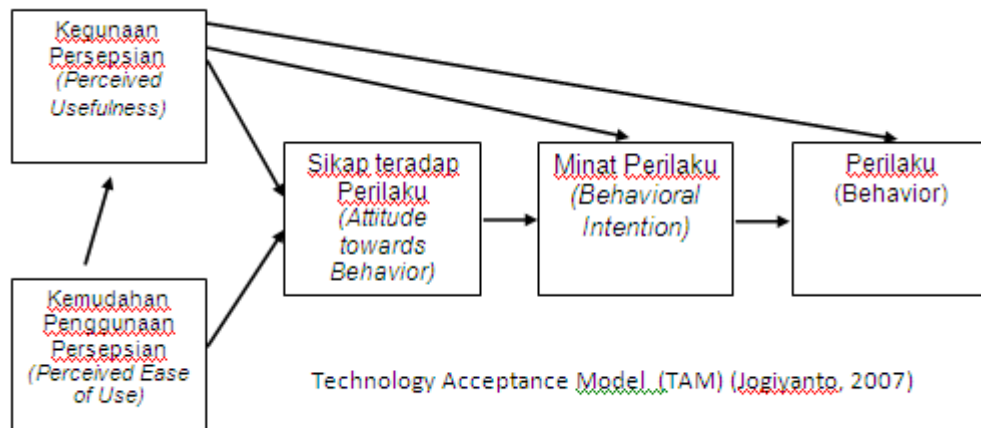
Perbedaan hasil dalam implementasi aplikasi siskeudes memang belum menemukan titik akhir. Penerimaan teknologi ini memang diperlukan kesiapan bagi para perangkat desa. Karena tidak semua perangkat desa ahli dalam bidang teknologi. Meskipun siskeudes dirancang secara sederhana dan *user friendly*, namun pasti ada kesulitan – kesulitan yang akan di temui oleh perangkat desa khususnya operator desa dalam hal pengoperasiannya. Terlebih ini adalah hal baru bagi mereka.

Sukses atau tidaknya aplikasi siskeudes bagi desa dapat kita nilai dari bagaimana penerimaan dan respon para pengguna siskeudes dengan adanya aplikasi ini. Respon dari pengguna ini dapat kita lihat dari beberapa manfaat yang dirasakan bagi pengguna. Bagaimana mereka menilai aplikasi ini dalam menjalankan tugasnya sebagai pengguna, serta sikap atau minat pengguna dalam menggunakan aplikasi siskeudes. Dalam teori penerimaan, penggunaan terhadap suatu sistem yang baru dikenal dengan teori penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model (TAM)*. Teori penerimaan ini digunakan untuk mengetahui reaksi dan persepsi pengguna teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikap seseorang dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut, (Fisbein, 1980). Tujuan utama TAM adalah memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam suatu populasi (Davis et.al., 1989).

TAM adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana users atau pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Teori ini membuat model perilaku seseorang sebagai suatu fungsi dari tujuan perilaku. Tujuan perilaku ditentukan oleh sikap atas perilaku tersebut (Sarana, 2000). Model penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM) ini dikembangkan oleh Davis et al. (1989) berdasarkan model *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model TRA diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat pelakunya. Jogiyanto (2007:111) menyebutkan bahwa TAM menambahkan dua konstruk utama dalam model TRA, yaitu kegunaan persepsian (*perceived usefulness*), dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh kedua konstruk tersebut.

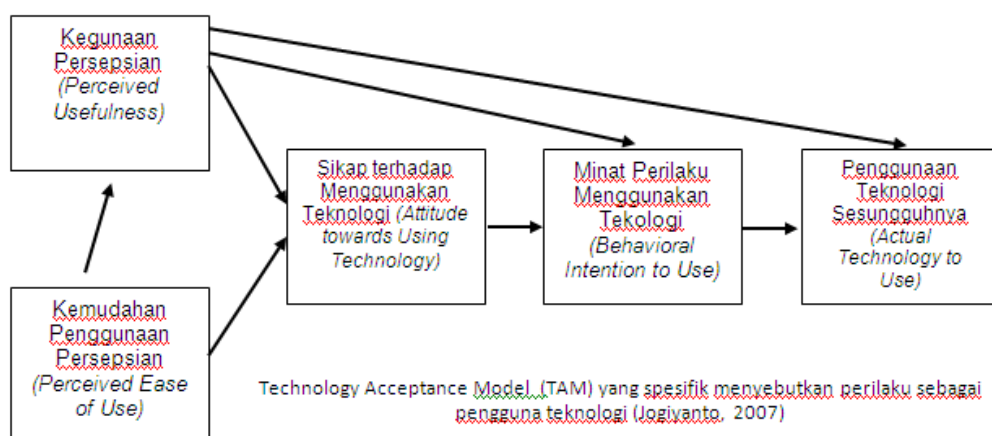
Jogiyanto (2007:112) juga menyatakan bahwa kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) keduanya mempunyai pengaruh terhadap minat perilaku (*behavioral intention*). Pemakai teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) juga mempengaruhi kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) tetapi tidak sebaliknya. Model dari Tam dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Kerangka Model TAM



Karena TAM dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka perilaku (*behavior*) di TAM dimaksudkan sebagai perilaku menggunakan teknologi. Oleh karena itu TAM juga banyak dituliskan lebih spesifik pada penggunaan teknologi sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Model TAM pada Teknologi



TAM mempunyai lima konstruk persepsian yang digunakan dalam teorinya. Kelima konstruk tersebut adalah kegunaan persepsian (*Perceived*

usefulness), Kemudahan Penggunaan Persepsian (*Perceived Ease of Use*), Sikap terhadap Menggunakan Teknologi (*Attitude towards Using Technology*), Minat Perilaku Menggunakan Teknologi (*Behavioral Intention to Use*), dan Penggunaan Teknologi Sesungguhnya (*Actual Technology to Use*). (Davis et.al., 1989)

Jogiyanto (2007:114), menjelaskan kelima konstruk dalam Model TAM. Pertama adalah kegunaan persepsian (*Perceived usefulness*) yang diartikan dengan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kedua adalah kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*), di definisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari usaha. Selanjutnya adalah sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*). Menurut Davis et al. (1989) dalam Jogiyanto (2007:116) diartikan sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan di tentukan. Sedangkan menurut Mathieson (1991) dalam Jogiyanto (2007:116) mengartikannya sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikannya menggunakan sistem. Keempat adalah minat perilaku (*behavioral intention*), Jogiyanto (2007:116) mengartikan sebagai suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Terakhir adalah perilaku (*behavior*) yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal penggunaan teknologi, perilaku (*behavioral*) adalah penggunaan yang sesungguhnya (*actual use*) dari sebuah teknologi.

Dalam organisasi sektor publik model TAM ini banyak digunakan untuk menguji penerimaan terhadap sesuatu yang baru yang berhubungan dengan teknologi. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2010), yang

melakukan penelitian terhadap penerimaan komputer mikro pada KAP di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan TAM. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemudahan penggunaan komputer mikro akan mengurangi usaha (baik waktu maupun tenaga) seseorang (auditor) di dalam melaksanakan aktivitas audit. Selain pada KAP, model TAM juga digunakan untuk menganalisis penerimaan penggunaan teknologi pada ojek *online* atau ojol. Penelitian ini dilakukan oleh Christina (2018) yang menyebutkan bahwa konstruk yang ada dalam model TAM dapat diterima pada aplikasi ojek *online* ini.

Dalam sektor privat, model TAM juga digunakan sebagai alat penelitian untuk menguji penerimaan sebuah teknologi. Dalam penelitian Saputra (2016) model TAM digunakan untuk mengevaluasi penerapan *Management System Information* pada sebuah Perseroan Terbatas (PT). Hasilnya menunjukkan bahwa Pengguna *Management System Information* merasakan penggunaan yang cukup baik dan berguna bagi pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tarigan (2017) menggunakan model TAM untuk mengevaluasi terhadap penerimaan karyawan terhadap KMS (*Knowledge Management System*) *portal*. Hasilnya menyebutkan bahwa dari hasil pengolahan data kuisisioner yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi KMS *Portal* dapat diterima oleh karyawan. Hakim (2018) yang mengkaji tentang penerimaan pengguna terhadap sistem CRM di perusahaan X dengan menggunakan model TAM menyimpulkan bahwa penerimaan pengguna dipengaruhi oleh faktor manfaat penggunaan yang dirasakan oleh pengguna, kemudahan penggunaan sistem, serta perilaku pengguna dalam mengoperasikan sistem. Penelitian ini bermakna bahwa dimana semakin tinggi manfaat, kemudahan, serta

penggunaan sistem, maka tingkat penerimaan pengguna juga akan semakin tinggi, yang dibuktikan dengan durasi waktu dan frekuensi penggunaan sistem yang semakin tinggi. Sehingga, berdasarkan kajian menggunakan Model TAM, tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem CRM adalah positif dan signifikan.

Dari beberapa studi empiris yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa teori dari TAM dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerimaan individu / kelompok atas penggunaan teknologi. Peneliti mencoba untuk meneliti sebuah aplikasi siskeudes dalam lingkungan pemerintah desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa siskeudes merupakan aplikasi baru yang digunakan dalam mengelola keuangan desa. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santika dan I Putu (2017) dan Penelitian ini mencoba mengukur seberapa jauh tingkat penerimaan teknologi dengan menggunakan lima variabel dari konstruk TAM yang ada. Objek dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten Pamekasan. Pemilihan objek di sini karena desa di Kabupaten Pamekasan telah menggunakan aplikasi siskeudes dan pernah meraih penghargaan sebagai juara 1 Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun 2017 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (dikutip dari laman resmi BKD Kab. Pamekasan www.keuanganpamekasankab.com pada 4 Januari 2018).

Pada tahun yang sama, Pamekasan juga tercatat dalam kasus korupsi dana desa pertama di Madura yang melibatkan Bupati dan kepala desa juga beberapa oknum yang lain. Dalam kasus tersebut, bupati Pamekasan terlibat dalam pemberhentian penyelidikan Kejaksaan Negeri Pamekasan terhadap kasus korupsi proyek yang menggunakan dana desa sejumlah Rp 160 juta. Kepala kejaksaan negeri tersebut semula akan diberikan uang suap senilai Rp

200 juta. Namun kemudian ia meminta uang tambahan menjadi Rp 250 juta. (dipetik dari laman berita online www.tirto.id). Dengan adanya fakta yang terjadi, peneliti mencoba menyimpulkan bahwa masih ada sesuatu yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pamekasan mengalami masalah. Untuk itu peneliti mencoba memulai dengan mencari pengaruh pada penggunaan aplikasi siskeudes dengan menggunakan teori TAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba merumuskan pertanyaan untuk menjawab rasa keingintahuan dan juga mendapatkan sebuah pemahaman baru. Dalam hal ini fokus penelitian tertuju pada para perangkat desa khususnya operator desa dalam menggunakan aplikasi siskeudes. Dengan berdasar pada teori dari TAM, peneliti mencoba merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
2. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap minat dalam penggunaan teknologi (*behavioral intention to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
3. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual technology to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
4. Apakah persepsi kemudahan (*erceived ease of use*) berpengaruh terhadap sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?

5. Apakah persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
6. Apakah sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) berpengaruh terhadap minat dalam *penggunaan teknologi* (*behavioral intention to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
7. Apakah minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*) berpengaruh terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual technology to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?
8. Apakah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) berpengaruh terhadap minat dalam penggunaan teknologi (*behavioral intention to use*) dengan sikap sebagai variabel intervening pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, selanjutnya tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terhadap sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terhadap minat dalam penggunaan teknologi (*behavioral intention to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual technology to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan (*erceived ease of use*) terhadap sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.
5. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) berpengaruh terhadap persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sikap dalam penggunaan teknologi (*attitude towards using technology*) terhadap minat dalam *penggunaan teknologi* (*behavioral intention to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan.
7. Untuk mengetahui pengaruh minat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*) terhadap penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual technology to use*) pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?.
8. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terhadap minat dalam penggunaan teknologi (*behavioral intention to use*) dengan sikap sebagai variabel intervening pada aplikasi siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa di Kab.Pamekasan?

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada berbagai pihak, pertama : bagi para perangkat desa atau operator desa yang berguna untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menerima aplikasi siskeudes dan menggunakannya dengan baik serta dapat menambah pengetahuan mengenai model penerimaan teknologi.

Kedua, kontribusi bagi pemerintah kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Pamekasan untuk pengimplementasian aplikasi siskeudes di kabupaten Pamekasan.

Ketiga, kontribusi bagi dunia akademis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan wawasan dalam sektor publik dan untuk mengembangkan ilmu akuntansi sektor publik.